

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian Kampanye Warga Berdaya untuk melihat proses perubahan sikap sebagai hasil dari kegiatan persuasif. Kampanye Warga Berdaya diinisiasi oleh masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam berbagai komunitas yang bergerak di bidang lingkungan untuk merespon masifnya pembangunan hotel, mall, dan apartemen di Yogyakarta beberapa waktu terakhir yang terbukti diwarnai pelanggaran dan kecurangan yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kampanye Warga Berdaya yang sudah berjalan sejak awal 2014 ini, mengusung pesan “Jogja Ora Didol” untuk menggambarkan fenomena maraknya pembangunan hotel, mall, dan apartemen di Yogyakarta.

A. Jogja Ora Didol

Dalam Bahasa Indonesia berarti “Jogja Tidak Dijual” merupakan sebuah manifesto penolakan eksploitasi atas hak publik, di mana masifnya pembangunan berbagai bangunan seperti hotel, mall, dan apartemen di Yogyakarta pada tiga tahun terakhir yang seharusnya didasari asas kemanfaatan oleh dan bagi masyarakat, justru berpihak pada pemilik modal yang hanya mengejar kepentingan ekonomi atau profit semata. Pembangunan yang mengatasnamakan peningkatan perekonomian Yogyakarta, namun disisi lain, warga sekitar juga terimbas dampak negatif dari masifnya pembangunan

yang tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat Jogja merasa resah dan khawatir akan kondisi Jogja yang seharusnya “Berhati Nyaman” menjadi tidak nyaman lagi karena masifnya pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan (wargaberdaya.wordpress.com)

Yogyakarta dengan segala keunggulan dan keistimewaan, menjadi daya tarik bagi para pemilik modal dan *developer* dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pertama, Yogyakarta sebagai destinasi wisata dunia, terpopuler kedua di Indonesia setelah Bali. Indikasinya, jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari tahun ke tahun. Kedua, sebagai Kota Pelajar, Yogyakarta selalu dibanjiri pendatang yang ingin menuntut ilmu di Yogyakarta. Jumlah mahasiswa baru bisa mencapai 200.000-300.000 per tahunnya. Ketiga, Yogyakarta telah bertransformasi menjadi kota urban, di mana Yogyakarta terbuka bagi segala perubahan, termasuk gaya hidup yang merupakan pengaruh dari proses migrasi urban dengan beragam latar belakang (Alexander, 2015: 1).

Namun, bagi sebagian masyarakat, keistimewaan Yogyakarta sesungguhnya tidak hanya diukur dari tegaknya berbagai bangunan mall, hotel, dan apartemen, tetapi justru terletak pada nilai luhur dan kebudayaan yang saat ini mulai luntur dengan masifnya pembangunan yang tidak memperhatikan sosial dan lingkungan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, berdasarkan data dari PHRI DIY, hingga tahun 2013 terdapat 1160 hotel dan 6 pusat perbelanjaan di Yogyakarta (Evan, 2013: 1). Jumlah

tersebut tentu akan bertambah karena pada tahun 2014 sudah terdapat 104 permohonan pembangunan hotel baru masuk ke Dinas Perizinan, belum termasuk 70 izin yang sudah dikeluarkan. Sementara itu, hingga tahun 2018 masih akan ada 6 pusat perbelanjaan yang akan dibangun di Yogyakarta. Faktanya, pembangunan hotel, mall, dan apartemen di Yogyakarta 85% masih terpusat di Kota Yogyakarta dan Sleman. Apabila pembangunan ditujukan untuk menyediakan fasilitas bagi wisatawan, justru pembangunan tidak hanya dipusatkan pada beberapa titik saja, tetapi di kawasan seperti Bantul dan Gunung Kidul.

Tabel 1
Jumlah Hotel di Yogyakarta
(Metro TV, 2015)

	Bintang	Non Bintang
2012	32	354
2013	39	362
2014	43	366

Pada satu sisi, pembangunan fisik dapat digunakan sebagai parameter pertumbuhan perekonomian suatu daerah, namun pembangunan yang tidak pro sosial dan lingkungan justru akan menggerus tatanan sosial ekonomi yang sudah ada. Masifnya pembangunan tersebut, tidak diiringi dengan penyediaan ruang hijau dan ruang publik. Adanya pengrusakan untuk pembangunan, pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak terkendali yang berimbas pada kemacetan, berkurangnya ruang hijau dan tergerusnya ruang publik bagi pejalan kaki dan pesepeda, semakin menipisnya air tanah dan mengeringnya air sumur adalah berbagai kondisi yang dikeluhkan oleh masyarakat

Yogyakarta selama kurun waktu tiga tahun terakhir sejak masifnya pembangunan hotel, mall, dan apartemen di Yogyakarta.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyatakan bahwa bertambahnya jumlah hotel dan apartemen di Yogyakarta saat ini telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, antara lain menipisnya debit sumber air dangkal, pencermaran sungai, dan kualitas udara. Hal tersebut dikarenakan setiap pembangunan hotel akan memiliki potensi mengganggu fungsi aliran air tanah dangkal. Sementara itu, keberadaan sumber air tanah dangkal sebagai sumber air utama masyarakat juga akan terus menerus berkurang akibat kebutuhan air perhotelan yang rata-rata menggunakan sumber air tanah dalam. Di beberapa wilayah di Yogyakarta, beberapa sumur masyarakat sudah mengalami penurunan debit sehingga masyarakat harus menggali sumur lebih dalam lagi untuk mendapatkan air. Tidak hanya dampak lingkungan, aspek psikologis masyarakat atau wisatawan terkait karakter Yogyakarta lambat laun akan berubah ketika bangunan hotel, mall, atau apartemen mendominasi setiap sudut Yogyakarta (n.n., 2014: 1)

Meskipun pembangunan tersebut mengatasnamakan peningkatan ekonomi masyarakat Yogyakarta, namun manfaat tersebut hanya dirasakan oleh segelintir pihak saja. Sementara masyarakat luas khususnya warga disekitar bangunan tersebut, justru merasa resah dan dirugikan. Untuk meminimalisir dampak dari masifnya pembangunan tersebut, diperlukan pengawasan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa pembangunan tidak akan menggerus lingkungan dan tatanan sosial ekonomi yang ada.

Jogja Ora Didol sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang takut akan kehilangan keistimewaan Yogyakarta, bertujuan untuk memantau dan mengawasi pembangunan di Yogyakarta secara ketat atas dasar kecintaan pada keistimewaan Yogyakarta. Aspirasi atas keresahan masyarakat tersebut dituangkan secara positif, baik melalui lagu “Jogja Ora Didol” yang diciptakan Jogja Hiphop Foundation, melalui film “Belakang Hotel”, teater *Sego Gurih*, *campaign* di media sosial twitter dengan hashtag #JogjaOraDidol yang diramaikan oleh sejumlah *public figure* seperti Butet Kertaradjasa, Glen Fredly, JRX SID, Jogja Hip Hop Foundation, dan blog jogjaoradidol.wordpress.com sebagai wadah aspirasi masyarakat Yogyakarta terakit Jogja Ora Didol.

Menanggapi desakan berbagai pihak, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 77 tahun 2013 tentang Moratorium Pemberian Izin Pembangunan Hotel mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016. Namun, moratorium ini dianggap terlambat oleh berbagai pihak, karena sebelum moratorium tersebut dikeluarkan, sudah ada 104 *developer* yang mengajukan izin pembangunan. Nantinya, pembangunan tersebut akan tetap diproses setelah masa berlaku moratorium tersebut berakhir, yaitu 31 Desember 2016.

Meskipun pada tahun 2014-2015, perizinan pembangunan hotel, mall, dan apartemen dihentikan sementara, namun pada tahun 2016 masih akan ada 104 bangunan yang didirikan di Yogyakarta. Menyikapi hal tersebut, sejumlah komunitas bergerak bersama-sama untuk meminimalisir dampak masifnya

pembangunan di Yogyakarta dengan mengedukasi warga yang berpotensi terkena dampak negatif dari masifnya pembangunan. Salah satunya adalah Warga Berdaya.

B. Kampanye Warga Berdaya

1. Komunitas Warga Berdaya

Terbentuk atas inisiatif positif yang diusung oleh warga Yogyakarta. Warga Berdaya merupakan sebuah wadah terbuka bagi warga dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendorong dan mendukung prinsip dan praktik pembangunan yang lestari dan adil di Yogyakarta. Sebagai salah satu bentuk sikap kritis terhadap proses pengelolaan kota dan kawasan khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya, Warga Berdaya berupaya untuk mengkritisi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak mengikuti kaidah prinsip pembangunan lestari justru menjadi ancaman, baik bagi warga kota maupun wilayah di sekitarnya.

Hal tersebut dikarenakan, ketika penyelenggara pemerintah kota, termasuk dewan legislatif tidak mampu melaksanakan mandat rakyat, maka warga harus turun tangan menggalang dukungan untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Pengelolaan kota yang mengabaikan kepentingan warga inilah, yang menjadi dasar terbentuknya komunitas Warga Berdaya.

Sejak terbentuk pada 23 Oktober 2014, komunitas yang terdiri dari +/- 100 anggota “warga berdaya” ini, sudah melakukan sejumlah program

untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi kolektif warga untuk mendorong dan mendukung praktik pembangunan yang lestari dan adil di Yogyakarta. Berbagai program tersebut, dirangkum dalam suatu kampanye, yaitu Kampanye Warga Berdaya.

2. Kampanye Warga Berdaya

Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat mengenai resiko terhadap makin banyaknya pembangunan yang kurang memperhatikan sosial lingkungan dan pemanfaatannya bagi masyarakat luas.

Hal tersebut didasarkan pada selama ini masyarakat baru “bersuara” ketika mereka sudah merasakan dampaknya. Dalam arti, selama ini masyarakat kurang ketat dalam memantau dan mengawasi pembangunan khususnya hotel, apartemen, dan mall di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, komunitas Warga Berdaya tergerak untuk melakukan sejumlah aksi untuk menggugah kesadaran atas hak hidup warga di Yogyakarta, dengan mengusung pesan “**Jogja Ora Didol**”. Tiga poin yang menjadi fokus dalam Kampanye Warga Berdaya adalah (suaramerdeka.com):

a. Memantau hotel atau bangunan yang bermasalah

Dalam hal ini, Kampanye Warga Berdaya pada prinsipnya tidak menolak pembangunan, tetapi pembangunan tersebut harus dikritisi dan diawasi apakah sudah sesuai dengan lingkungan sekitarnya dan

membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut, tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

- b. Membantu komunitas atau kampung yang terdampak atau berpotensi terdampak pembangunan dengan menguatkan kapasitas pengetahuan warga tentang prinsip, proses, dan dampak pembangunan

Hal tersebut dikarenakan, pada umumnya masyarakat belum kompak dalam menyikapi pembangunan disekitarnya. Salah satunya disebabkan karena masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait resiko pembangunan yang masif, sehingga masyarakat belum dapat menyikapi secara bijak pembangunan yang ada disekitarnya.

- c. Menggalakkan partisipasi aktif warga untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan disekitarnya

Dalam hal ini, warga didorong untuk “berdaya” dalam menyikapi pembangunan disekitarnya, seperti melaporkan pelanggaran IMB maupun peraturan daerah yang dilanggar oleh *developer*.

Warga Berdaya dalam kampanye-nya mengusung program-program yang menarik dan kreatif. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat lebih mudah memahami dan tertarik dengan isu yang diusung oleh Warga Berdaya. Adapun berbagai program yang dilakukan oleh Kampanye Warga Berdaya sebagai berikut:

a. Merthi Kutha

Merti dalam bahasa Indonesia berarti membersihkan, menjaga, merawat. Sedangkan *kutha* berarti kota. Warga Berdaya yang terdiri dari berbagai komunitas dan aktivis di Yogyakarta, bergotong royong untuk bersama-sama membenahi kualitas ruang publik kota. Dengan menyisir sejumlah ruas jalan utama, Warga Berdaya mengecat marka jalur sepeda, memberi *wheat paste* pada jalur pejalan kaki dan difabel, mencabuti iklan luar ruang yang tidak pada tempatnya dan diakhiri dengan berbondong-bondong mengantarkan hasil membersihkan iklan luar ruang (sampah visual) ke Balai Kota. Aksi ini diselenggarakan selama dua kali dalam satu tahun.

b. Penelitian

Anggota Warga Berdaya yang berprofesi sebagai akademisi, pakar, dan anggota yang masih berstatus mahasiswa, bekerjasama untuk melakukan penelitian atau observasi terkait dampak masifnya pembangunan hotel, mall, dan apartemen di Yogyakarta. Penelitian terakhir yang dilakukan adalah untuk meninjau langsung wilayah-wilayah yang sumurnya mulai kering akibat dampak pembangunan hotel. Salah satunya di Miliran dan Palagan Yogyakarta. Hasil penelitian dan survey tersebut rencananya akan didokumentasikan dalam bentuk film dokumenter dan akan dijadikan bahan diskusi.

c. Pembuatan Film Dokumenter #JogjaOraDidol #JogjaAsat

Bekerjasama dengan WatchDoc yang disutradai Dandy Laksono, Warga Berdaya mencoba memberi gambaran dampak pembangunan hotel yang masif di Kota Yogyakarta selama dua tahun terakhir dengan membuat film dokumenter “Belakang Hotel”. Film berdurasi 40 menit ini secara khusus menyoroti sumur-sumur warga di kawasan Gowongan, Malioboro, Miliran dan Penumping yang tiba-tiba hilang airnya dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar akibat pembangunan hotel atau apartemen di sekitar tempat tinggalnya.

Meskipun film ini dibuat dengan pesan yang ingin disampaikan kepada publik tentang salah satu dampak maraknya hotel di Yogyakarta, namun film ini bukan berarti mengajak masyarakat untuk anti investasi dan anti hotel. Dalam hal ini, keberadaan hotel sebenarnya juga dibutuhkan untuk membangun sektor pariwisata, namun pembangunannya harus dipastikan tidak bermasalah dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Film Belakang Hotel dapat diakses melalui youtube dan forum-forum diskusi.

d. Diskusi dan Pemutaran Film Belakang Hotel

Merupakan salah satu upaya penyadaran ke masyarakat Yogyakarta tentang cara menyikapi rencana pembangunan hotel, apartemen, dan mall di sekitar tempat tinggalnya. Awalnya diskusi dan pemutaran film ini hanya menasar kampung-kampung yang ada di Yogyakarta, namun Warga Berdaya menyadari bahwa dalam

menangani persoalan pembangunan yang masif di Yogyakarta ini diperlukan dukungan dari berbagai pihak atau lintas bidang. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, Diskusi dan Pemutaran Film ini menyasar ke berbagai komunitas dan akademisi. Hal tersebut dikarenakan Warga Berdaya ingin semua warga baik itu praktisi, akademisi, seniman atau mahasiswa ambil bagian dalam kampanye ini dan berkontribusi sesuai bidang keahliannya.

Materi yang didiskusikan adalah terkait cara menganalisis potensi risiko pembangunan hotel atau apartemen terhadap kondisi cadangan air tanah, cara memahami konsep desain hotel, analisis pada pemenuhan syarat perizinan hingga isi Amdal, dan cara bagaimana warga menyikapi kegiatan sosialisasi pembangunan. Dalam diskusi ini menghadirkan beberapa pemateri baik dari pakar/akademisi, jurnalis, warga yang menjadi korban pembangunan, dan sebagainya. Nantinya, diskusi ini akan ditutup dengan pemutaran film dokumenter *Belakang Hotel*, agar warga juga mengetahui gambaran dampak masifnya pembangunan mall, apartemen, dan hotel di Yogyakarta. Film dipilih sebagai media kampanye kesadaran lingkungan dan membuka kekritisan warga kampung atas kebijakan pemerintah.

Diharapkan diskusi dan pemutaran film ini dapat diakhiri dengan pernyataan komitmen dari warga dalam menyikapi rencana pembangunan disekitar tempat tinggalnya.

e. Pementasan Teater Segu Gurih

Bekerjasama dengan komunitas Teater Segu Gurih, Warga Berdaya akan menampilkan sandiwara berbahasa Jawa dengan judul “POGENG” yang dalam bahasa Indonesia artinya hotel. Teater ini akan ditampilkan dari kampung ke kampung, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai dampak pembangunan hotel, mall, dan apartemen yang masif di Yogyakarta. Rencananya, teater Segu Gurih ini akan mulai ditampilkan pada akhir tahun 2015.

Program Kampanye Warga Berdaya difokuskan untuk mempersiapkan masifnya pembangunan mall, apartemen, dan hotel di Yogyakarta pasca memoratorium perizinan pembangunan berakhir pada akhir tahun 2016. Adapun Kampanye Warga Berdaya difokuskan pada tahun 2014 – 2016. Pertama, kampanye diawali dengan tahapan sosialisasi dan edukasi “mitigasi bencana” kepada target kampanye. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat belum kompak dalam menyikapi pembangunan disekitarnya. Salah satunya disebabkan karena masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait resiko pembangunan yang masif, sehingga masyarakat belum dapat menyikapi secara bijak pembangunan yang ada disekitarnya.

Kedua, berdasarkan diskusi dan pemutaran film diharapkan masyarakat mulai dapat menentukan sikap dalam menyikapi rencana pembangunan di sekitar tempat tinggalnya. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam pernyataan atau perencanaan langkah yang akan dilakukan dalam menyikapi rencana pembangunan. Ketiga, komunitas Warga Berdaya dan

warga bersama-sama memantau, mengawasi, dan mengkritisi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pembangunan hotel, mall, atau apartemen disekitar tempat tinggalnya. Dalam tahapan ini, warga yang tadinya “belum berdaya” sudah lebih “berdaya” dalam menghadapi rencana pembangunan di sekitar tempat tinggalnya.

Pada periode satu tahun pertama kampanye diselenggarakan, yaitu tahun 2014 – 2015, target Kampanye Warga Berdaya difokuskan pada sosialisasi dan edukasi “mitigasi bencana” kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat. Setelah itu, Warga Berdaya ini mendorong masyarakat dalam menyikapi rencana pembangunan hotel, mall, atau apartemen di sekitar tempat tinggalnya secara bijak.

C. Kampanye Warga Berdaya: Diskusi dan Pemutaran Film Belakang Hotel di UII

1. Latar Belakang Diskusi dan Pemutaran Film di UII

Pada akhir april 2015 lalu, Warga Berdaya bekerjasama dengan LPM Profesi Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan Kampanye Warga Berdaya yaitu diskusi dan pemutaran film Belakang Hotel. Dalam kampanye tersebut, menghadirkan pembicara Eko Siswoyo (Kepala Pusat Studi Lingkungan dan akademisi), Dodo Widodo (aktivis lingkungan sekaligus korban sumur kering akibat pembangunan hotel Fave di

Miliran), dan Priwantoro (Ketua Paguyuban Warga Gadingan). Kampanye ini dihadiri sekitar 40 peserta yang terdiri dari mahasiswa UII dan Paguyuban Warga Gadingan Tolak Apartemen.

Kerjasama antara Warga Berdaya dengan Teknik Sipil UII dalam menyelenggarakan kampanye ini bertujuan untuk menggalang dukungan kepada masyarakat luas, khususnya akademisi dan pakar di UII untuk *aware* dan dapat bersikap dalam menyikapi rencana pembangunan apartemen Gadingan di Jalan Kaliurang km 17. Hal tersebut dikarenakan Paguyuban Warga Gadingan Tolak Pembangunan Apartemen membutuhkan kontribusi dan partisipasi masyarakat luas khususnya akademisi dan pakar dalam upaya mengkritisi dan mengawasi rencana pembangunan apartemen Gadingan.

Kampanye ini dijadikan momen untuk memperkuat dukungan dari masyarakat Yogyakarta dari berbagai latar belakang profesi, dikarenakan dalam mengkritisi dan menyikapi pembangunan yang masif membutuhkan kerjasama dan kontribusi lintas bidang. Kontribusi dan partisipasi tersebut dapat berupa melakukan penelitian, diskusi ilmiah terkait dampak lingkungan, pembuatan film dokumenter, dan sebagainya.

2. Deskripsi Acara Diskusi dan Pemutaran Film Belakang Hotel di UII

Acara dimulai dengan pemutaran film Belakang Hotel yang berdurasi 40 menit. Film tersebut menceritakan keadaan sebuah daerah di Yogyakarta, yaitu kampung Miliran yang menurut

penduduknya selama berpuluh tahun tidak pernah kekeringan air. Akan tetapi, permasalahan terjadi ketika sebuah hotel yang dibangun di dekat pemukiman menimbulkan kekhawatiran warga karena dianggap sebagai penyebab kekeringan air. Selain kampung Miliran, kampung-kampung yang disoroti yaitu Muja Muju, Umbulharjo, dan Kampung Penumping, Gowongan, Jetis.

Film *Belakang Hotel* dibuka dengan *scene* warga menimba air dalam sumur yang dalam nyaris kering dan narasi mengenai jumlah kamar hotel di Yogyakarta. Pada 2003, Yogyakarta memiliki 7.237 kamar hotel. Angka ini meningkat drastis pada 2013 menjadi 10.303 kamar. Ironinya, satu kamar hotel membutuhkan 380 liter air per hari. Sedangkan satu rumah tangga hanya butuh 300 liter air per hari.

Salah satu contohnya adalah warga yang terpaksa setiap hari merogoh kocek 2000 rupiah untuk menumpang mandi di kamar mandi umum pasar. Adegan lain ditampilkan saat seorang warga yang protes dengan cara mandi debu di depan hotel. Mas Dodo, pelaku aksi teatrikal mandi debu yang kebetulan saat diskusi juga hadir mengatakan, bahwa sejak ia lahir hingga saat ini berumur 37 tahun sumur warga tidak pernah kering. Seandainya pun terjadi kemarau panjang, air sumur menyusut namun masih mudah didapatkan. Namun semenjak ada hotel berbintang di kampungnya, air sumur di rumah-rumah penduduk seakan menghilang. Sebagai pembanding, dalam salah satu *scene* ditampilkan Kampung Prenggan, Kotagede, yang

meski saat ini sudah mulai padat penduduk, namun tanpa pembangunan hotel, sumber air masih bisa dipertahankan.

Pada *scene* lain, ditunjukkan bahwa perwakilan Warga Berdaya berupaya menemui pihak terkait dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk meminta penjelasan mengenai keringnya sumur warga dan hubungannya dengan maraknya pembangunan hotel di Yogyakarta. Dalam *scene* tersebut, BLH menjelaskan bahwa fenomena keringnya beberapa sumur warga disebabkan karena pergantian cuaca yang memasuki musim kemarau dan curah hujan yang sedikit. BLH juga menunjukkan sumur yang berada di belakang kantor BLH juga mengalami kekeringan, padahal disekitarnya tidak banyak pembangunan hotel.

Setelah pemutaran film, dilanjutkan dengan diskusi oleh ketiga pembicara yang hadir. Diskusi dibagi dalam dua sesi, sesi pertama membahas mengenai dampak dari masifnya pembangunan dan fenomena perizinan pembangunan hotel dan apartemen di Yogyakarta. Eko Siswoyo selaku Kepala Pusat Studi Lingkungan dan dosen Fakultas Teknik Lingkungan UII menyebutkan bahwa masifnya pembangunan yang hanya terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, menyebabkan persediaan air tanah di wilayah tersebut semakin menipis. Sleman yang notabene memiliki persediaan air tanah yang cukup tinggi dibanding kabupaten lain, apabila terus dieksploitasi akan menyebabkan penipisan air tanah dan resapan air akan hilang

seiring dengan masifnya pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

Masifnya pertumbuhan hotel dan apartemen di Yogyakarta saat ini berpotensi menipiskan debit sumber air dangkal, pencermaran sungai, dan kualitas udara. Berbagai dampak tersebut saat ini mulai dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta. Setiap pembangunan hotel akan memiliki potensi mengganggu fungsi aliran air tanah dangkal. Hal tersebut dikarenakan keberadaan setiap bangunan *basement* hotel akan membelokkan air tanah dangkal yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, keberadaan sumber air tanah dangkal sebagai sumber air utama masyarakat juga akan terus berkurang akibat kebutuhan air perhotelan yang rata-rata menggunakan sumber air tanah dalam.

Lebih lanjut, pembangunan di Yogyakarta lebih baik apabila mempertimbangkan zonasi atau pembagian wilayah. Zona tersebut terdiri atas zona inti dan zona penyangga. Di dalam zona inti yang merupakan wilayah vital Yogyakarta dibatas Sungai Code di sebelah timur dan Sungai Winongo di sebelah barat. Apabila pembangunan tidak diatur dengan baik, maka zona inti yang merupakan wilayah vital DIY akan semakin semrawut dan dapat menghilangkan identitas Yogyakarta. Saat ini, 85% pembangunan hotel dan apartemen masih difokuskan di daerah Sleman dan Yogyakarta, hal itu tidak seimbang dengan luasnya wilayah di kabupaten lain yang sama-sama memiliki

potensi. Sehingga, harapannya kedepannya pembangunan dapat diratakan tidak hanya berfokus pada daerah tertentu saja.

Selanjutnya, Widodo selaku aktivis lingkungan dan korban sumur kering Miliran menyebutkan bahwa permasalahan sebenarnya tidak hanya soal air dan lingkungan saja. Beberapa hal yang perlu dikhawatirkan adalah dampak sosial, di mana orientasi masyarakat saat ini menjadi orientasi ekonomi, seperti hidup lebih konsumtif, hidup mengutamakan keuntungan ekonomi, dan sebagainya. Sementara, Yogyakarta istimewa juga karena nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya, seperti gotong royong, srawung, dan kesederhanaan. Sehingga, keistimewaan Yogyakarta tidak hanya dilihat dari tumbuh suburnya mall, hotel, atau apartemen, Yogyakarta istimewa karena budayanya. Selain itu, Widodo juga menjelaskan, berdasarkan pengalamannya dalam memantau pembangunan hotel, mall, atau apartemen yang bermasalah, baru diketahui kalau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa didapatkan setelah bangunan dibangun. Hal itu sangat disayangkan, karena izin yang menjadi syarat utama dalam mendirikan bangunan, justru bisa “dipermainkan”. Oleh karenanya, sebagai warga yang berdaya, perlu memantau, memperhatikan, dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara adil, pro rakyat, dan pro lingkungan.

Sementara itu, sesi kedua dilanjutkan dengan pemutaran film dokumenter yang dibuat oleh warga Gadingan sebagai bentuk

penolakan terhadap rencana pembangunan apartemen Gadingan yang terletak di Jalan Kaliurang km 17. Dalam film tersebut ditunjukkan berbagai upaya warga untuk menyampaikan aspirasi penolakannya. Seperti musyawarah, audiensi dengan perangkat daerah, dan pembuatan spanduk bertuliskan penolakan warga. Priwanto selaku perwakilan Paguyuban Warga Tolak Pembangunan Apartemen Gadingan sekaligus koordinator pembuatan film dokumenter tersebut mengatakan bahwa film ini diharapkan dapat menjadi media kampanye untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat luas terhadap upaya penolakan warga tersebut.

Setelah pemutaran film, dilanjutkan dengan diskusi terkait rencana pembangunan apartemen Gadingan yang prosesnya sudah berlangsung sejak akhir tahun 2014. Priwanto menjelaskan pada Agustus 2014, warga Gadingan dikejutkan dengan beberapa *banner* disekitar Gadingan, Sleman “Telah Terjual Beberapa Unit Apartemen”. Warga kemudian sepakat untuk melakukan konfirmasi kepada kepala Dukuh Gadingan karena selama ini warga merasa belum ada sosialisasi terkait pembangunan apartemen Gadingan.

Komunitas Warga Berdaya melakukan sosialisasi kepada warga terkait menyikapi rencana pembangunan secara bijak. September 2014, pihak investor apartemen Gadingan melakukan sosialisasi ke desa Gadingan untuk memberitahukan rencana pembangunan apartemen Gadingan. Hanya saja, warga yang diundang dalam sosialisasi tersebut

hanya beberapa tokoh masyarakat saja sehingga sebagian besar warga Gadingan tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proyek tersebut. Mengetahui hal tersebut, warga bermusyawarah dan memutuskan bahwa 100% warga Gadingan menolak pembangunan apartemen.

Oktober 2014, pihak apartemen Gadingan melakukan sosialisasi ulang kepada warga, dengan harapan seluruh warga mendapatkan informasi yang jelas terkait rencana pembangunan tersebut. Namun, tanggapan warga Gadingan jauh diluar dugaan, karena warga yang diundangn menyatakan menolak dan tidak setuju dengan rencana pembangunan apartemen tersebut, ditambah lagi, pihak *developer* dianggap kurang transparan. Penolakan warga Gadingan terhadap pembangunan apartemen didasari pada kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan yang dapat terjadi disekitar apartemen tersebut yang tentunya akan dirasakan oleh warga Gadingan.

Desember 2014 – Januari 2015, warga Gadingan didampingi oleh Komunitas Warga Berdaya melakukan audiensi dengan sejumlah perangkat daerah, namun belum ada tindak lanjut terkait aspirasi warga Gadingan. Upaya warga untuk menolak pembangunan apartemen Gadingan nyatanya kurang berjalan mulus. Beberapa kendala dialami warga Gadingan bahkan dianggap sebagai bentuk “ancaman”. Seperti penutupan spanduk penolakan warga oleh pihak yang tidak dikenal dan pembakaran lahan kosong yang terletak di padukuhan Gadingan.

Melihat kondisi tersebut, komunitas Warga Berdaya dan Paguyuban Warga Tolak Pembangunan Apartemen Gadingan merasa membutuhkan kontribusi dan partisipasi masyarakat luas dalam menyikapi rencana pembangunan apartemen Gadingan, khususnya akademisi dan pakar di UII yang secara geografis juga berdekatan dengan padukuhan Gadingan. Selain itu, mahasiswa UII nantinya juga akan menjadi target pasar dari apartemen Gadingan ini.

Kampanye ini kemudian diakhiri dengan pernyataan dan komitmen peserta kampanye untuk bersama-sama mengawal dan mengkritisi proses pembangunan apartemen Gadingan.